

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah, dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang diambil didasari dari peraturan daerah yang sesuai dengan Perundang-undangan (Siahaan, 2005). Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber penerimaan daerah yang harus terus ditingkatkan untuk dapat menanggung sebagian dari belanja yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga dapat menciptakan kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan serta bertanggung jawab bisa terlaksanakan (Darise, 2006).

Menurut “Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan peraturan Undang-Undang (UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1, ayat 18) “sumber pendapatan asli daerah diperoleh

dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sumber-sumber penerimaan PAD harus terus dicari untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk mengembangkan otonomi daerah”.

Pendapatan Asli Daerah bertujuan guna memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah sesuai potensi sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Mardiasmo (2002) PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD, hasil pengelolaan kekayaan dan aset daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:

(1) Pajak Daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepala tanpa mendapat imbalan langsung yang seimbang yang dipaksa dengan asas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat melaksanakan penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan Mangkusubroto (1994) mengatakan bahwa pajak ialah pungutan yang berupa hak

prerogatif pemerintah, serta pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak guna membayar yang mana tidak terdapat balas jasa secara langsung yang dirunjukkan oleh penggunaanya.

(2) Retribusi Daerah

Menurut “UU No. 34 Tahun 2000, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Berdasarkan dari uraian diatas maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi daerah menurut Haritz (1995) sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan memiliki sifat yang ekonomis.
- (2) Terdapat imbalan secara langsung kepada yang membayar.
- (3) Iuran memenuhi persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar.
- (4) Retribusi ialah pungutan yang biasanya *budgeting* tidak menonjol.
- (5) Dalam hal-hal tersebut retribusi daerah biasa digunakan untuk suatu tujuan tertentu, akan tetapi terdapat banyak hal yang tidak lebih dari pengambilan biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi setiap permintaan masyarakat.

Koho (2001) mengatakan retribusi yang diserahkan cukup memadai, baik dalam jenis maupun jumlahnya. Namun hasil riil yang dapat disumbangkan sektor ini bagi keuangan daerah masih terbatas dikarenakan tidak semua jenis retribusi yang dipungut oleh Kabupaten/Kota memiliki prospek yang baik. Ciri-ciri pokok retribusi daerah menurut koho, sebagai berikut:

- (1) Retribusi dipungut daerah
- (2) Dalam pemungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat di tunjuk.
- (3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan oleh daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

“Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. “Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengklarifikasikan apa saja yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:

- (1) Hasil dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Jasa giro.
- (3) Pendapatan bunga.
- (4) Keuntungan dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- (5) Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai imbalan dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa yang oleh pemerintah”.

2. Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik ialah salah satu yang mendasari teori pertumbuhan yang digunakan dari dulu hingga saat ini. Dari teori pertumbuhan ekonomi klasik ini dijelaskan oleh tokoh-tokoh ekonom terkenal yakni Adam Smith dan David Ricardo.

Adam Smith berpendapat (dalam Arsyad, 2004) membedakan dua aspek utama dalam melihat kenaikan pertumbuhan ekonomi, yaitu: pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Dalam pertumbuhan output total sistem produksi suatu negara dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- (1) Sumber Daya Alam yang tersedia

Sumber daya alam belum dapat dipergunakan dengan maksimal maka jumlah penduduk dan stok modal merupakan sebuah peran penting dalam pertumbuhan output. Lalu

sebaliknya pertumbuhan output akan berhenti apabila penggunaan sumber daya alam ini sudah mencapai titik maksimal.

(2) Sumber Daya Insani

Pertumbuhan jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan angkatan kerja yang bekerja dari masyarakat.

(3) Stok Barang Modal

Jumlah dan tingkat pertumbuhan output akan berjalan tergantung dengan laju pertumbuhan stok modal.

b. Neo Klasik

Dalam teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh dua orang tokoh ekonom, yaitu Robert Solow dan Trevor Swan. Teori neoklasik menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ialah yang bersumber dari penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang dapat menyinggung jumlah penawaran agregat. Dalam teori pertumbuhan ekonomi ini juga menekankan bahwa bila terjadi perkembangan dalam faktor-faktor produksi dan meningkatkan kualitas teknologi ini adalah salah satu faktor yang dapat menentukan peningkatan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2005).

Teori neoklasik membagi jenis input yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi menjadi tiga, yaitu:

- (1) Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi
- (2) Pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi
- (3) Pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi

Teori neoklasik berpendapat yang berbeda dari teori klasik yakni dari segi penawaran. Pertumbuhan ekonomi ini bergantung kepada fungsi produksi, persamaan ini dinyatakan dengan:

$$Y = TK_{\alpha} L_{1-\alpha} \dots\dots\dots(2.3)$$

Dimana:

Y = output

K = modal

L = angkatan kerja

T = teknologi

Dikarenakan tingkat kemajuan teknologi ditentukan secara eksogen maka model neoklasik Solow Juga disebut model pertumbuhan eksogen. Model Solow sendiri yakni memiliki beberapa kekurangan dan dalam memperbaikinya yaitu dengan cara memecah total faktor produksi dengan memasukan variabel lain, yang dimana variabel ini dapat menjelaskan tingkat

pertumbuhan yang terjadi. Model ini biasa disebut dengan model pertumbuhan endogen.

Model pertumbuhan endogen beranggapan bahwa perdagangan internasional memiliki peran penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Model perdagangan internasional dapat diukur melalui aktifitas ekspor dan impor, yaitu:

$$Y = F (A_i , K_i , L_i) \dots\dots\dots(2.4)$$

Dimana :

Y = output

A = indeks produktifitas

K = modal

L = angkatan kerja yang bekerja

i = tahun

Sedangkan indeks produktifitas (A) adalah merupakan fungsi dari ekspor (X) dan impor (M), yaitu:

$$A_i = F (X_i M_i) \dots\dots\dots(2.5)$$

Model Solow hanya dapat menerangkan hubungan antara modal dan angkatan kerja yang bekerja saja, sehingga ditambahkan lagi variabel mutu modal manusia untuk dapat membantu

menjelaskan pola pertumbuhan ekonomi selain modal dan angkatan kerja yang bekerja, yaitu :

$$Y = TK\alpha L_t \beta H_1^{1-\alpha-\beta} \dots\dots\dots(2.6)$$

Dimana :

Y = output

K = modal

L = tenaga kerja

T = teknologi

H = modal manusia

Pertumbuhan penduduk dan akibatnya pada kenaikan jumlah angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang disebabkan dengan jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti pekerja produktif lebih banyak untuk menghasilkan output (Todaro, 2011).

c. Harrod-Domar

Dalam teori pertumbuhan menurut ahli ekonomon Harrod-Domar menganalisis mengenai syarat-syarat dalam mencapai pertumbuhan yang mantap (*steady growth*). Dimana perkembangan dari teori makro keynes jangka pendek yang menjadi suatu makro ekonomi dalam jangka panjang. Harrod-Domar sendiri melihat pengaruh pengeluaran investasi (I) tidak hanya memiliki pengaruh

(lewat proses multiplier) terhadap permintaan agregatif (AD), akan tetapi juga terhadap penawaran agregatif (AS) dengan melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi.

Model pertumbuhan Harrod-Domar secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Tabungan (S) merupakan suatu proporsi (s) dari output total (Y), maka secara persamaan:

$$S = sY$$

2. Investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal (K) yang diwakili oleh ΔK , sehingga persamaannya:

$$I = \Delta K$$

Karena jumlah stok modal K mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional Y seperti yang ditunjukkan rasio modal output K, maka:

$$\Delta K = k\Delta Y$$

3. Versi sederhana dari Harrod-Domar, yaitu:

$$\Delta Y = sk$$

Dari persamaan teori Harrod-Domar dapat dijelaskan terdapat hubungan yang positif antara pendapatan nasional dengan rasio tabungan yang apabila terdapat kenaikan GDP maka rasio

tabungan akan naik. Hal bisa terjadi apabila tidak ada pengaruh dari pemerintah. Harrod-Domar sendiri menjelaskan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat mudah, yakni dengan menabung atau berinvestasi sebanyak mungkin guna untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2005)

d. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB)

Teori ekonomi daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Lincoln, 1999). Dalam mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu harus dibandingkan dengan pendapatan nasional berbagai tahun yang dihitung berdasarkan harga konstan. Sehingga perubahan dalam nilai pendapatan hanya semata-mata disebabkan oleh suatu perubahan dalam suatu tingkat kegiatan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dihitung melalui indikator perkembangan PDRB dari tahun ke tahunnya, perekonomian dapat dikatakan baik apabila tingkat kegiatan ekonomi masa sekarang lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya.

4. Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum, yang menyatakan bahwa:

“Dana Alokasi Umum (DAU) ialah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan memiliki tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk dapat membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Dalam mewujudkannya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. DAU yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bersifat (*block grant*), yang berarti pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan bertujuan untuk dapat menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah.

5. Dana Alokasi Khusus

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk dapat membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus, dengan

memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Daerah tertentu yang dimaksud yakni adalah daerah-daerah.

6. Investasi

Investasi adalah sebuah langkah awal kegiatan dalam melakukan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal sangat mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan upaya menumbuhkan perekonomian setiap negara akan berusaha untuk menciptakan iklim yang dapat meningkatkan investasi. Sasaran yang dapat ditunjukkan tidak hanya pada masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, melainkan juga luar negeri (Dumairy, 1996).

B. Hubungan Antar Variabel

1. Produk Domestik Regional Bruto terhadap PAD

PDRB merupakan tolak ukur pendapatan masyarakat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula seseorang mengeluarkan pendapatannya untuk membayar pajak (*ability pay*) yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, dengan semakin tingginya PDRB perkapita riil suatu daerah, maka akan semakin besar kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah (Atmaja, 2007).

Santosa dan Rahayu (2005) mengatakan hubungan antara PAD terhadap PDRB merupakan hubungan fungsional, dikarenakan PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan daerah. Selain itu juga dapat mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktifitasnya.

2. Dana Alokasi Umum terhadap PAD

Dana alokasi daerah dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah agar dapat mendanai kebutuhan daerah. DAU dialokasikan untuk provinsi/kabupaten/kota. Semakin tinggi DAU yang diterima oleh daerah, maka semakin tinggi nilai dari PDRB daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena peran DAU yang diterima pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah khususnya untuk belanja modal. DAU sendiri memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional di daerah tersebut. Ketika pengelolaan DAU dilakukan dengan benar maka dana tersebut akan menjadikan program kerja yang telah dirancang oleh pemerintah daerah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik atau infrastruktur berjalan dengan baik, dengan terlaksana program kerja pemerintah daerah maka akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

3. Dana Alokasi Khusus terhadap PAD

Dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan pelaksanaan desentralisasi, dimana urusan diserahkan kepada daerah, tugas dan beserta wewenang untuk dapat mengatur dan mengurus permasalahan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Desentralisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan manajemen pembangunan menjadi lebih lincah, akurat, dan tepat. Hal pemerintah pusat menyerahkan atau mendistribusikan kepada daerah tersebut disertai dengan penyerahan atau transferan keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

Salah satu hubungan keuangan pusat dan daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yakni dana bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan/ditransfer kepada daerah untuk dapat membiayai kegiatan khusus yang merupakan tanggung jawab daerah dan merupakan prioritas nasional, sehingga untuk dapat membantu mengurangi beban dari biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu pelaksanaan DAK sendiri diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam perhitungan DAK perdaerah harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan, sehingga dengan pengelolaan

DAK secara bijak dan benar oleh pemerintah daerah maka DAK akan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Investasi terhadap PAD

Pada dasarnya investasi adalah suatu kegiatan awal dalam membentuk pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi bisa dilaksanakan dengan berbagai pihak yakni baik pihak swasta ataupun pemerintah. Investasi merupakan cara yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomidan standar hidup masyarakat dalam jangka panjang (Mankiw, 2003).

Pembentukan investasi adalah masyarakat tidak menggunakan seluruh pendapatannya untuk di konsumsi, melainkan sebagian dari pendapatannya di tabung dan tabungan ini diperlukan untuk pembentukan investasi. Pembentukan investasi telah dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Seperti investasi peralatan modal atau pembentukan modal tidak hanya memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara pembentukan investasi dengan pertumbuhan ekonomi di suatu negara (Prasetyo, 2009).

Investasi asing atau lebih dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan PMA yang secara langsung dilakukan berdasarkan oleh ketentuan “Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut”. Pengertian modal asing disini adalah merupakan alat pembayaran luar negeri yang tidak

merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk melakukan pembiayaan perusahaan di Indonesia. Serta merupakan alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia (LG Rai Widjaya, 2000)

Selanjutnya, modal dalam negeri merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun pihak swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan untuk menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 yang menjelaskan tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengatur mengenai pengertian dari Modal Asing (Widjaya, 2000). Penanaman modal dalam negeri juga memiliki peranan yang sangat penting untuk memaksimalkan pendapatan ekonomi di suatu negara.

Harrod-Dhomar melihat pengaruh yang besar dari investasi dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Menurutnya, pengeluaran investasi (I) tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat (Z) saja, tetapi juga terhadap penawaran agregat (S) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu jangka panjang, investasi menambah stok kapitas (misalnya pabrik, jalan, dan sebagainya). Jadi $I = \Delta K$, dimana K adalah stok modal kapital dalam masyarakat. Ini berarti dengan terjadinya peningkatan kapasitas produksi masyarakat yang akan menghasilkan output

yang potensial, yang bisa dihasilkan melalui stok kapital atau kapasitas pabrik yang ada (Boediono, 1992).

C. Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab ini akan membahas penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendasar pemikiran dan pertimbangan dalam menyusun penelitian ini. Berikut merupakan tabel penelitian terdahulu adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Metode	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Arif Suciadi R, 2014, <i>Tingkat Kontribusi dan Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang</i>	Analisis Deskriptif, Analisis Kontribusi, dan Analisis Efektifitas	Dependen <ul style="list-style-type: none"> ■ PAD Independen <ul style="list-style-type: none"> ■ Pajak Hotel ■ Pajak Restoran 	1. Variabel Pajak Hotel dan Restoran dalam Tingkat efektifitas dikategorikan “sangat efektif” dapat meningkatkan PAD. 2. Variabel Pajak Hotel dan Restoran dalam tingkat kontribusi dikategorikan “sangat efektif” dapat meningkatkan PAD.
2.	Karlina Batik,	Analisis	Dependen	1. Variabel Investasi

	2013, <i>Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Bangunan, dan Inflasi terhadap PAD di Lombok Barat</i>	Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> ■ PAD <p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Investasi ■ PDRB ■ Jumlah Penduduk ■ Penerimaan Pembangunan ■ Inflasi 	<p>berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>2. Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>3. Variabel Jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan.</p> <p>4. Variabel Penerimaan Pembangunan berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>5. Variabel Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan.</p>
3.	Rina Rahmawati Ruswandi, 2009, <i>Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Sumedang</i>	Analisis Deskriptif dan menggunakan Metode Regresi Linier Berganda	<p>dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ PAD <p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pajak Daerah ■ Retribusi Daerah ■ Laba Usaha Daerah ■ Penerimaan PAD lainnya 	<p>1. Variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>2. Variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>3. Variabel Laba Usaha Daerah berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>4. Variabel Penerimaan PAD lainnya berpengaruh positif dan signifikan.</p>
4.	Ayu Desmawati, zamzami, dan	Regresi	Dependen	1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh

	Zulgani, 2015, <i>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi</i>	Data Panel	<ul style="list-style-type: none"> ■ PAD <p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pertumbuhan Ekonomi 	positif dan signifikan.
5.	Rima Adelina, 2013, <i>Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kab. Gresik</i>	Metode Deskriptif	<p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pendapatan Daerah <p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pajak Bumi, dan Bangunan 	<p>1. Variabel Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tingkat efektifitas dikategorikan “sangat efektif” dapat meningkatkan Pendapatan Daerah.</p> <p>2. Variabel Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tingkat Kontribusi dikategorikan “sangat Kurang” dapat meningkatkan Pendapatan Daerah.</p>

6.	Dodi Nondra, dkk, 2013, <i>Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD terhadap PAD di Kab. Pesisir Selatan</i>	Regresi linier berganda	Dependen <ul style="list-style-type: none"> ■ PAD Independen <ul style="list-style-type: none"> ■ Pajak Daerah ■ Retribusi Daerah ■ Laba BUMD 	1. Variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan. 2. Variabel Retribusi Daeah berpengaruh positif dan tidak signifikan. 3. Variabel Laba BUMD berpengaruh positif dan tidak signifikan.
7.	Jing Jin dan Heng-fu Zou, 2005, <i>Fiscal Decentralization Revenue and Expenditure Assignments, and Growth in China</i>	Regresi data panel	Dependen <ul style="list-style-type: none"> ■ Pertumbuha n ekonomi Independen <ul style="list-style-type: none"> ■ Tarif Pajak Pajak Pusat ■ Tarif Pajak Provinsi ■ Belanja ■ Pendapatan ■ Extra-Belanja ■ Extra-Pendapatan ■ Transfer 	1. Variabel belanja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Variabel Pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 3. Variabel Extra-Belanja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 4. Variabel Extra-pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 5. Variabel Tarif Pajak Pusat berpengaruh negatif dan

			<p>Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Remitansi Provinsi ■ TK ■ Investasi ■ Keterbukaan ■ Inflasi Provinsi tertinggal 	<p>tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>6. Variabel Tarif Pajak Provinsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>7. Variabel Tenaga Kerja dan Investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>8. Variabel Keterbukaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>9. Variabel Inflasi Provinsi Tertinggal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>
8.	<p>Khubbi Abdillah dan Djoko Mursinto, 2016, <i>The Effects of Financial Balance Transfer and Regional Own-Source Revenue on</i></p>	<p><i>Pooled Least Square (PLS)</i></p>	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Belanja Daerah <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ PAD ■ DAU 	<p>1. Variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>2. Variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>3. Variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>4. Variabel DBH berpengaruh</p>

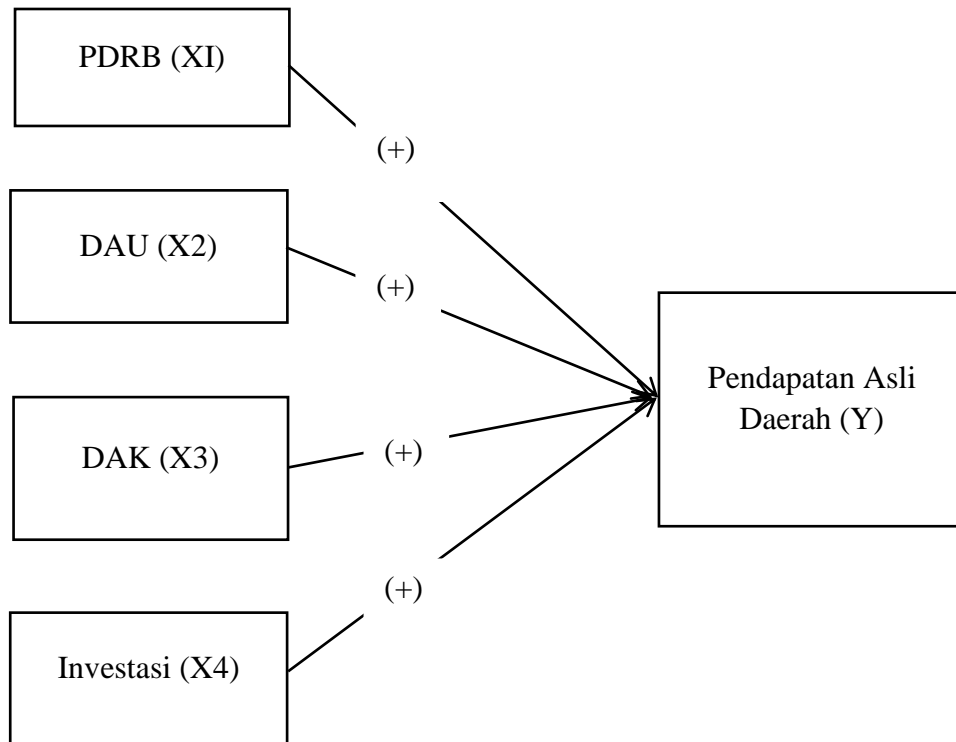
	<i>Regional Expenditure of Regencies and Municipalities in East Java Province</i>		<ul style="list-style-type: none"> ■ DAK ■ DBH 	positif dan tidak signifikan.
9.	Etty Susilowati dan Diana Endah Rahmadewi, 2018, <i>Encouraging a Regional Autonomy in Indonesia: An Analysis of Factors Affecting the Own Source Revenue of Central Java Province</i>	Regresi Linier Berganda	<p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ PAD <p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Belanja Modal ■ Inflasi ■ DAK ■ Pengeluaran pembiayaan (<i>financing expenditure</i>) 	<p>5. Variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>6. Variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan.</p> <p>7. Variabel DAK berpengaruh negatif dan signifikan.</p> <p>8. Variabel <i>Financing Expenditure</i> berpengaruh positif dan signifikan.</p>
10.	Iskandar Ali Alam, 2016, <i>The Impact of Economic Structure Change on the Local Own Source Revenue and Regional Income Improvement</i>	Regresi Linier Berganda	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Regional Financial Improvement</i> <p>Intervening:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Local Own Source Revenue</i> 	<p>1. Variabel Sektor Pertanian berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>2. Variabel Sektor Pertambangan dan Penggalan berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>3. Variabel Sektor Manufaktur berpengaruh positif dan</p>

			<p>(PAD)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sektor Pertanian ■ Sektor Pertambangan dan Penggalian ■ Sektor manufaktur ■ Sektor Bangunan ■ Listrik, gas dan sektor pasokan air ■ Sektor perdagangan, hotel, dan restoran ■ Sektor transportasi dan komunikasi ■ Keuangan, sewa guna usaha dan layanan sektor 	<p>signifikan.</p> <p>4. Variabel Sektor Bangunan berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>5. Variabel Listrik, gas dan sektor pasokan air berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>6. Variabel Sektor Perdagangan, hotel, dan restoran berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>7. Variabel Sektor Transportasi dan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>8. Variabel Keuangan, sewa guna usaha dan layanan sektor perusahaan berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>9. Variabel Sektor Jasa berpengaruh positif dan signifikan.</p>
--	--	--	---	---

			perusahaan ■ Sektor Jasa	
11.	Idhar Yahya, dkk, 2016, <i>Factor Affecting The Growth Of Regional Revenue in the District/City of North Sumatera</i>	<i>multiple regression model and residual analysis regression</i>	Dependen: ■ Pertumbuhan PAD Independen: ■ Pengeluaran Investasi ■ DAU ■ DBH ■ Dana Transfer Provinsi	1. Variabel Pengeluaran Investasi berpengaruh positif dan signifikan. 2. Variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan. 3. Variabel DBH berpengaruh positif dan signifikan. 4. Variabel Dana Transfer Provinsi berpengaruh positif dan signifikan.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam pembahasan ini, dimana atas dasar pemikiran teoritis dan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengenai dengan berbagai hubungan antara variabel independen (PDRB, DAU, DAK, dan Investasi) dengan variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah), maka faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap provinsi di Indonesia dapat di gambarkan dengan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

E. Hipotesis

Berdasarkan isi paparan diatas mulai dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka penelitian, maka dapat diajukan penelitian sebagai berikut:

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi di Indonesia.
2. Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi di Indonesia.
3. Diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi di Indonesia.
4. Diduga Investasi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi di Indonesia.